

NYAI MUNJIDAH WAHAB DAN GERAKAN KESETARAAN GENDER PEREMPUAN PESANTREN

Umniyatul Labibah
Sekolah Tinggi Ilmu al-Qur'an Miftahul Huda Banyumas
umniemoehammad@yahoo.com

ABSTRAK

Perempuan pesantren sejauh ini distigmakan sebagai kelompok perempuan yang hanya berperan sebagai konco wingking, dan ranah kiprahnya hanya di wilayah domestik atau internal pesantren. Kepemimpinan perempuan pesantren sering dianggap sebagai “pemimpin kelas dua” disebabkan penyangga utama pesantren adalah figur kyai atau laki-laki. Nyai Munjidah Wahab memberikan warna berbeda diantara perempuan pesantren pada umumnya, dengan bukan saja menjadi pemimpin pesantrennya tetapi merambah wilayah publik melalui jalur organisasi dan politik hingga menjadi seorang kepala daerah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi tokoh yang bertujuan untuk memotret Gerakan kesetaraan gender oleh perempuan pesantren yaitu Nyai Munjidah Wahab, bagaimana pemikirannya tentang kesetaraan gender serta bagaimana manifestasinya dalam Gerakan kesetaraan gender di lingkungan pesantren dan di masyarakat. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Nyai Munjidah tentang perempuan sangat relevan dengan nilai-nilai kesetaraan gender. Manifestasi pemikiran Nyai Munjidah Wahab dalam mengelola pesantrennya dan dalam kiprah politiknya juga menunjukkan kearah penguatan kesetaraan gender. Sehingga profil Nyai Munjidah Wahab sebagai perempuan pesantren mengisi konfigurasi wajah Gerakan keadilan gender islam di Indonesia.

Keyword : Nyai Munjidah Wahab, Perempuan Pesantren dan Keadilan Gender

A. Latar Belakang Masalah

Peran serta perempuan dalam berbagai aspek kehidupan adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa disangkal. Sejauh ini diskriminasi gender menjadi kendala terwujudnya *gender equality* atau kesetaraan gender. Dalam analisa Mansour Fakhri¹ ada proses domestifikasi terhadap perempuan dalam peran-peran gender. Ketidakadilan gender yang dikonstruksikan oleh masyarakat patriarkhi menempatkan perempuan pada peran-peran domestik, sementara sektor publik dianggap sebagai wilayah laki-laki.² Pandangan bias gender tersebut berakar kuat dalam masyarakat patriarkhi yang membentuk stigma dimana laki-laki lebih superior dari pada perempuan. Sejarah masyarakat patriarkhis,³ telah menempatkan perempuan sebagai *the second class* atau manusia kelas dua,⁴ dimana perempuan tidak dipandang sebagai manusia seutuhnya sebagaimana laki-laki hanya karena memiliki sistem reproduksi yang berbeda.⁵

Kuatnya kultur patriarkhi yang melahirkan berbagai bentuk ketidakadilan gender telah melahirkan berbagai Gerakan menuju kesetaraan gender (*gender equality*), tak terkecuali di pesantren. Apalagi sejauh ini masyarakat kerap melabeli pesantren sebagai bagian dari penyangga struktur patriarkhi. Pesantren yang menjadi tempat bersemainya ilmu-ilmu agama, kerap menjadi corong atas tafsir agama yang dinilai tidak ramah perempuan. Dan diantara yang

¹ Mansour Fakhri, *Analisa Gender dan transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.ke.15, 2013), 23

² Ahmad Suhendra, “Rekonstruksi Peran Dan Hak Perempuan Dalam Organisasi Masyarakat Islam,” *Musāwa* Vol. 11, no. 1 (2012): 47–66.

³ Preeti S Rawat, “Patriarchal Beliefs, Women’s Empowerment, and General Well-Being” 39, no. 2 (2014): 43–55, <https://doi.org/10.1177/0256090920140206>.

⁴ Achmad Satori Ismail, “Fiqh Perempuan dan Feminisme” dalam “*Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*” (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), 133

⁵ Nur Rofiah, Bil.Uzm., *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas keperempuanan dan Keislaman*, (Bandung: Afkaruna, 2020), 3

terdampak langsung adalah perempuan pesantren.⁶ Kultur pesantren menempatkan perempuan pesantren sebagai konco wingking karena kepemimpinan dan kekuasaan pesantren berada di bawah sosok kyai.⁷ Kiai menjadi *brand image* dan *brand market* bagi Pesantren, yang memegang superioritas puncak tertinggi dalam hierarki struktural dan kultural Pesantren.⁸ Keberadaan perempuan pesantren dianggap tidak signifikan dan hanya menjadi *the second man* dalam lingkungan pesantren.

Penelitian terhadap gerakan kesetaraan gender di lingkungan pesantren menunjukkan bahwa keberadaan perempuan pesantren masih sub ordinatif, sebagaimana yang disimpulkan oleh Ahmad Yusuf Prasetyawan dan Lis Safitri (2019), menemukan bagaimana kepemimpinan perempuan di pesantren dipersepsikan bersifat sementara dan sekedar sebagai pemeran pengganti.⁹ Peran perempuan pesantren dalam ikut menjadi agen kesetaraan gender menjadi salah satu hal yang menentukan keberhasilan Gerakan gender di pesantren. Sebagaimana hasil penelitian Eny Puspita Ningrum dan Agus Mursidi (2018), yang mengungkap relasi kuasa bu nyai dalam peran-peran di pesantren lebih khusus peran nyai dalam mensosialisasikan konsep dan ajaran pesantren sangat signifikan sehingga memberi pencerahan kepada civitas pesantren tentang kesetaraan gender.

Diantara perempuan pesantren yang inspiratif dalam membangun kesetaraan gender adalah Nyai Munjidah Wahab, pengasuh utama pesantren al-Latifiyah Tambak Beras Jombang. Nyai Munjidah Wahab adalah sosok lain dari perempuan pesantren yang mampu keluar dari stigma dan kultur paternalistik, feodalistik dan patriarkhis, yang melingkupinya. Nyai Munjidah bukan hanya memimpin pesantren putri sebagaimana nyai pada umumnya, tetapi juga menjadi pengasuh utama pesantren putra-putri dan aktif di berbagai aktivitas dan organisasi sosial dan politik. Aktivitas sosial-politiknya pada hari ini mengantarkan beliau menjadi orang nomor satu di kabupaten Jombang. Nyai Munjidah memberi spectrum warna perempuan pesantren yang tidak melulu berkulat di ruang domestik atau internal pesantren, tetapi berkiprah di ruang publik, menjadi sosok yang merdeka bagi dirinya, tidak tersubordinasi, dan berdaya memilih dan menentukan pilihan hidupnya.

Focus penelitian ini adalah pada bagaimana pemikiran Nyai Munjidah Wahab tentang kesetaraan gender dan bagaimana implementasinya dalam kepemimpinannya baik di pesantrennya maupun dalam kepemimpinannya di publik. Dengan harapan penelitian ini menjadi bagian dari upaya mengungkap peran dan perjuangan perempuan, khususnya perempuan pesantren, dalam mempromosikan gerakan transformasi sosial. Sejauh ini, peran perempuan dalam keterlibatannya sebagai agen transformasi sosial seringkali terpinggirkan dan bahkan dilupakan. Masih sangat minim rekam jejak perempuan yang diabadikan dalam tulisan tentang peran-peran perempuan.¹⁰

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian ini adalah studi tokoh dengan fokus perhatian penelitian ini adalah pada bagaimana gerakan perempuan pesantren, yaitu Nyai Munjidah Wahab yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren al-Latifiyah Tambak Beras Jombang dalam mewujudkan kesetaraan gender. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi sebagai pengumpul data utama selain dokumentasi.

⁶ Hussein Muhammad, *Perempuan, Islam dan Negara: Pergulatan Identitas dan Entitas*, (Yogyakarta: Qolam, 2016), 29

⁷ Hamam Burhanuddin et al., "Pendidikan Berperspektif Gender Di Pesantren," *Al-Murabbi* 2, no. 1 (2015): 111-32.

⁸ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren; Studi Pandangan Hidup Kiai dan visinya mengenai masa depan Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2011), 3.

⁹ Ahmad Yusuf Prasetyawan and Lis Safitri, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Pesantren," *YINYANG: Jurnal Studi Islam, Gender Dan Anak* 14, no. 1 (2019): 39-69, <https://doi.org/10.24090/yinyang.V14>.

¹⁰ Farida Ulyani, "Politik Kepemimpinan Pesantren : Peran Publik Perempuan Di Pesantren Daarut Tauhid Bandung" 7, no. 2 (n.d.): 457-82.

Teknik analisis data menggunakan model Milles dan Huberman, yaitu teknik analisis data yang dilakukan secara interaktif. Teknik analisa data dilakukan melalui tiga tahap yaitu tahap reduksi data (*reduction*) upaya untuk menentukan data yang relevan, bermakna, dan hal-hal penting terkait gerakan Nyai Munjidah Wahab tentang *gender equality*. Penyajian data (*data display*) dalam bentuk uraian singkat yang bersifat naratif (dengan teks). Penarikan kesimpulan (*verification*) dimana peneliti akan membuat kesimpulan dengan memberikan penjelasan mengenai gerakan *gender equality* di pesantren oleh perempuan pesantren.¹¹

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Perempuan Pesantren dalam Prespektif Gender

Perempuan di pesantren, diidentifikasi diantaranya ada sosok bu nyai, ning, dan santri perempuan atau mbak santri. Secara sosial perempuan pesantren dibentuk dalam struktur sosial yang berlapis-lapis, yaitu struktur patriarkhi yang berada pada masyarakat dan feodalistik yang ada dalam pesantren. Dimana dalam struktur demikian garis keturunan laki-laki masih menjadi prioritas dan menjadi tumpuan keberlangsungan masa depan pesantren.¹² Struktur demikian membuat keberadaan perempuan dalam komunitas pesantren dinilai tidak begitu signifikan kecuali dalam hal-hal yang bersifat domestik.

Membaca situasi perempuan pesantren tidak bisa lepas dari frame analisa gender. Analisa gender adalah analisa relasi laki-laki dan perempuan yang melihat pada perbedaan yang diakibatkan oleh gender bukan kodrat. Gender berasal dari Bahasa Inggris, "*gender*" yang berarti jenis kelamin. Menurut Maggie Humm, gender adalah kelompok atribut dan perilaku yang dibentuk secara kultural yang ada pada laki-laki atau perempuan.¹³ Perbedaan gender terbentuk melalui proses yang sangat panjang didalamnya meliputi proses pembentukan, sosialisasi, konstruksi, legitimasi melalui ajaran agama dan hukum negara. Sosialisasi yang panjang pembentukan gender tersebut akhirnya "diterima" (secara tidak sadar) sebagai seolah-olah ketentuan tuhan yang tidak dapat diubah dan dianggap kodrati.¹⁴ Konstruksi sosial tersebut di dalam masyarakat membentuk tuntutan peran gender (*Gender role*), yang menentukan harapan-harapan kultural kepada laki-laki dan perempuan dalam berinteraksi antar satu dengan lainnya dalam masyarakat. Atribut gender pun termanifestasi dalam nilai tatakrama dan norma hukum yang ada dalam masyarakat yang membentuk perasaan gender (*gender feeling*). Jika seseorang tidak memenuhi peran gendernya ataupun tidak memiliki kepekaan perasaan gender maka orang tersebut akan menghadapi resiko sosial di dalam masyarakatnya.¹⁵

Alimatul Qibtiyah memberi contoh bagaimana perempuan Jawa dikonstruksikan oleh kulturenya hanya memiliki kekuatan dalam sektor informal yaitu, *manak*, *macak* dan *masak* (beranak, memasak dan berdandan) yang erat kaitannya penempatan perempuan pada wilayah kasur, sumur dan dapur. Bahkan di Jawa terdapat keyakinan adat bahwa istri harus mengikuti suami kemanapun suaminya pergi seperti dalam keyakinan *surgo nunut neroko katut*. Perempuan Jawa mengalami subordinasi dan menjadi tidak signifikan karena kekuatan masyarakat yang membentuknya dan dilanggengkan dengan cara-cara tertentu.¹⁶ Melalui prespektif gender secara sosial telah memberikan sudut pandang yang berbeda atas relasi laki-laki dan perempuan yang tidak bertumpu pada aspek biologis, dan dari sinilah nampak bahwa perbedaan gender telah menimbulkan ketimpangan gender yang pada akhirnya melahirkan ketidakadilan gender (*Gender inequalities*).

¹¹ Nur Latifah and Asep Supena, "Analisis Attention Siswa Sekolah Dasar Dalam Pembelajaran Jarak Jauh Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Basicedu* 5, no. 3 (2021): 1175-82, <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i3.887>.

¹² Whasfi Velasufah dan Adib Rifqi Setiawan, Nilai Pesantren Sebagai Dasar Pendidikan karakter. <https://alobatnic.blogspot.com/2020/04/nilai-pesantren-sebagai-dasar-pendidikan-karakter.html>

¹³ Maggie Humm, *Ensiklopedia...*,177

¹⁴ Mansour Fakih, *Analisa...*,10

¹⁵ Nasarudin Umar, *Argumen...*,74

¹⁶ Alimatul Qibtiyah, *Feminisme Muslim di Indonesia*, (Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, 2017),

Menempatkan perempuan pesantren dalam prespektif gender artinya melihat perempuan pesantren dengan segala atributnya, peran gendernya, perasaan gendernya sebagai konstruk sosial budaya yang bukan sepenuhnya sebagai kodrat yang harus diterima dan dijalani. Menjadi perempuan pesantren adalah menjadi manusia yang berbeda dengan perempuan pada umumnya. Perempuan pesantren menghadapi situasi patriarki yang hirarkis. Tembok-tebok pesantren, baik tembok fisik maupun tembok sosial membentuknya menjadi sosok perempuan yang diikat oleh nilai-nilai yang berbeda dalam adat, sikap dan perilaku bahkan dengan santri di lingkungannya. Ia dibentuk dalam nilai-nilai perempuan yang dicitrakan sebagai ning atau nyai yang akan menjadi panutan masyarakat.”

2. Biografi Nyai Munjidah Wahab

Nyai Hj Mundjidah Wahab adalah perempuan yang lahir dan dibesarkan dari rahim pesantren. Darah pesantren bukan hanya mengalir secara biologis dari ayahnya yang seorang ulama besar, pendiri dan penggerak NU, KH Wahab Chasbullah. Secara ideologis dan kultural pendidikannya dari jenjang sekolah dasar hingga setara SLTA ditempuh di dalam lingkungan pesantren. Nyai Munjidah Wahab lahir di Jombang pada 22 Mei 1948, dari pasangan suami istri KH Wahab Chasbulloh dan Nyai Hj Rohmah. KH Wahab Chasbullah dikenal dalam sejarah merupakan partner KH Hasyim Asy'ary, tokoh yang membidani lahirnya Komite Hijaz yang dikemudian hari menjadi bibit berdirinya NU. Putra dan putri Kyai Wahab Chasbulloh menjadi saksi perjalanan perkembangan NU beserta banom-banomnya yang berpengaruh pula terhadap pemikiran dan perannya di dalam masyarakat.

Pesantren beserta keseluruhan budayanya merupakan basis dasar keluarga Nyai Munjidah. Pesantren yang dibesarkan oleh ayahnya, KH Wahab Chasbulloh dikenal dengan nama Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, merupakan salah satu lembaga pendidikan pesantren tertua di Indonesia yang dirintis oleh buyutnya KH Abdus Salam sejak tahun 1825. Pada masa kepemimpinan ayahnya, yaitu KH. Wahab Chasbulloh, rintisan pesantren tersebut mengalami perkembangan yang pesat melalui upaya revitalisasi diantaranya dengan mendirikan madrasah yang diberi nama Madrasah Mubdil Fan. Ayahnya pula yang memberi nama pesantren tersebut dengan nama Bahrul Ulum pada tahun 1967. Nyai Munjidah Wahab dibesarkan dari tangan dingin KH. Wahab Chasbulloh, organisatoris yang multitalenta yang melalui tangan beliaulah lahir berbagai organisasi yang menjadi cikal NU dan ormas-ormasnya, seperti Tashwirul Afkar, Nahdlatul Wathan dan Nahdlatul Tujjar. Sebagai orang yang memiliki pengalaman dan pergaulan luas, KH Wahab Chasbulloh mendidik putra-putrinya dengan egaliter, maju dan terbuka, diantaranya Nyai Munjidah sedari kecil telah diperlihatkan bagaimana bermasyarakat dan berorganisasi. Ibunya, Nyai Hj. Rohmah dikenal sebagai orang yang gigih dalam berdakwah dan mendidik masyarakatnya melalui pertemuan-pertemuan rutin dalam berbagai kelompok di masyarakat.

“sejak kecil, saya sudah diajak bapak saya mengikuti berbagai konferensi baik kenegaraan maupun muktamar NU. Saya di ajak melihat istana, menyaksikan berbagai kesibukan bapak saya menemui berbagai tamu-tamu penting kenegaraan, bahkan bertemu dengan Presiden Sukarno. Seolah saya dikenalkan iklim birokrasi kenegaraan”

Pendidikan Nyai Munjidah Wahab ditempuh keseluruhan di pesantren dari tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI setara Sedolah dasar) hingga Madrasah Aliyah (MA setara SLTA) di lingkungan pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang. Semasa menjadi siswa, ia telah menunjukkan jiwa kepemimpinannya, dengan aktif di beberapa organisasi dan menjadi pimpinan di dalamnya, diantaranya di dalam IPPNU Cabang Jombang dan menjadi Ketua Persatuan Pelajar Bahrul Ulum. Selesai menamatkan Madrasah Aliyah, Nyai Munjidah sempat melanjutkan pendidikan pesantrennya di Lasem. Sekembalinya dari pesantren di Lasem, Nyai Munjidah mengikuti jejak perjuangan ayahnya membesarkan Nahdlatul Ulama dengan berkiprah di dalamnya mulai dari IPPNU, Fatayat, hingga Muslimat.

Selain berorganisasi, Nyai Munjidah juga terjun langsung dalam dunia politik yang mengantarkannya menjadi anggota legislatif di usia 21 tahun melalui partai NU pada pemilu tahun 1955. Pada masa orde baru menyederhanakan partai-partai menjadi tiga partai, Nyai Munjidah

bergabung dengan partai PPP yang memiliki basis agama islam. Di PPP karir politiknya mulai menapaki garis tegas sebagai politisi ulung, dimulai dari menjadi pengurus DPC hingga DPW serta menjadi anggota legislatif. Pada tahun 1971 beliau menapaki kembali karir legislator dengan menjadi anggota legislatif di DPRD Jombang, hingga pada tahun 1997-2014 beliau merangkak naik menjadi legislator di tingkat DPRD Jawa Timur dari fraksi PPP.

Karir politik Nyai Munjidah Wahab semakin bersinar. Pada tahun 2013, mencoba peruntungan dengan mengikuti konstestasi politik pemilihan kepala daerah di kabupaten Jombang, dengan mendapat peruntungan menjadi wakil Bupati Jombang periode 2013-2018, mendampingi Bupati Nyono Suharli Widoko. Pada periode berikutnya, yaitu di pilkada 2018, Nyai Munjidah melaju ke kursi nomor satu di Kabupaten Jombang berpasangan dengan Sumrambah untuk tahun kepemimpinan hingga 2023.

Meskipun kultur perempuan pesantren lebih banyak mendudukan perempuan pesantren sebagai pendamping kyai di dalam pengelolaan pesantren, Nyai Munjidah Wahab mampu berkiprah di dua kaki yaitu dengan tetap menjalankan tugasnya sebagai istri kyai, sebagai pengasuh pesantren dan sebagai pelayan publik. Sosok Nyai Munjidah memberikan angin segar bagi perempuan pesantren dan mampu menepis anggapan stereotipe terhadap perempuan pesantren. Kiprahnya di dunia politik yang panjang dan konsisten, menjadi modal tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya.

Sebagai perempuan, Nyai Munjidah tetap menjalankan perannya sebagai istri sekaligus sebagai ibu. Suaminya, KH Imam Asy'ari Muhsin memberikan dukungan penuh terhadap perjalanan karir Nyai Munjidah Wahab. Bersama suaminya, Nyai Munjidah Wahab mendirikan asrama al-Latifiyah yang merupakan ribath dari Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras dan mendirikan Madrasah unggulan KH Wahab Chasbulloh. Keduanya bersama-sama bahu membahu mengembangkan pesantren di satu sisi dan Nyai Munjidah tetap memenuhi aktifitas organisasi dan politiknya. Pada tahun 1996, Kyai Asy'ari wafat, saat itu Nyai Munjidah menjabat sebagai anggota dewan di tingkat propinsi Jawa Timur. Nyai Munjidah Wahab melanjutkan kepemimpinan pesantrennya bersama anak-anaknya.

3. Pemikiran Nyai Munjidah Wahab tentang Kesetaraan Gender

Bagi Nyai Munjidah, Kehidupan adalah penghayatan atas nilai-nilai al-Qur'an dan Sunnah nabi. Dari al-Qur'an dan hadist, Nyai Munjidah memedomani kehidupan seharusnya bisa terselenggara dengan berlandaskan keadilan dan kesetaraan gender. Kehidupan yang baik menurutnya adalah yang mendasarkan pada ketaatan dan penghayatan nilai-nilai al-Qur'an, apalagi bagi perempuan yang ia lihat memiliki banyak kekhususan-kekhususan tertentu. Al-Qur'an memberi visi yang jelas tentang bagaimana laki-laki dan perempuan merupakan pemimpin dunia yang harus memperjuangkan kehidupannya kearah yang lebih baik. Menurutnya :

“Ayat al-Quran bagi setiap muslim harus ditaati dan dihayati. al-Qur'an menempatkan perempuan menjadi manusia terhormat. Al-Qur'an menginginkan manusia baik laki-laki maupun perempuan sebagai pemimpin di dunia ini. Perempuan saat ini dengan berbagai situasi dan kondisinya sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Karena kalau tidak perempuan sendiri yang berjuang untuk kehidupannya, siapa lagi....”

Menurut Nyai Munjidah, kehidupan yang baik bagi perempuan bukanlah sesuatu pemberian tetapi sesuatu yang harus diperjuangkan. Diantara wadah memperjuangkan kaum perempuan adalah di wilayah politik, dimana di situ terjadi pertarungan dalam pembuatan regulasi. Regulasi yang berwujud berbagai kebijakan perundang-undangan menjadi wilayah perebutan berbagai kepentingan, termasuk di dalamnya kepentingan perempuan. Nyai Munjidah mengatakan :

“Yang menjadi alasan saya terjun di politik ini memang memandang bahwa kalau kita, perempuan, tidak masuk di situ maka produk-produk peraturan maupun perundang-undangan yang di buat legislatif bisa merugikan kaum perempuan. Sehingga kalau kita dari umat Islam terutama yang perempuan ini tidak terlibat di situ, maka terjadilah nanti akan ada suatu undang-undang atau yang di mana mendiskreditkan perempuan, terutama untuk umat Islam.”

Keberadaan Nyai Munjidah sebagai perempuan yang di besarkan di pesantren tidak membuatnya tenggelam dalam tradisi kultus pesantren yang membuatnya melupakan masyarakatnya. Sebaliknya melalui berorganisasi sejak kecil, Nyai Munjidah merasakan manfaatnya berbaur dengan masyarakat melebur sekat-sekat feodalistik yang ada di pesantren. Di organisasilah, menurutnya, siapapun dapat belajar menjadi dirinya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Di organisasi pula, siapapun akan dilatih tampil di depan umatnya, berlatih menyampaikan pendapat, bermusyawarah dan merumuskan tindakan-tindakan kecil organisasi. Prinsip egaliter yang dibangun di organisasi ini menurutnya sejalan dengan prinsip Q.S.al-Hujarat: 3 yang mengatakan bahwa manusia diciptakan baik laki-laki maupun perempuan baik suku bangsa atau negara apapun tidak dihitung mulia kecuali karena ketakwaan di hadapan Allah. Nyai Munjidah menyampaikan :

“saya belajar berorganisasi di IPPNU. Melalui diskusi kelompok. Berlatih bicara. Melatih menyampaikan pendapat. Melatih berorganisasi...saya berlatih berbaur dengan masyarakat. Tidak ada sekat atau hak istimewa meski saya putri seorang kyai. disinilah saya pikir nilai-nilai al-Qur’an tentang kesetaraan...”

Nyai Munjidah memandang al-Qur’an sangat memuliakan perempuan. Menurutnya Allah telah memuliakan penciptaan manusia baik laki-laki dan perempuan, sehingga seharusnya perempuan memuliakan kehidupannya dengan memberi banyak kemanfaatan bagi sesame. Nyai Munjidah mengimplementasikan pemikirannya dalam kehidupan berorganisasi dan berpolitik dan dengan tetap menjalankan peran-peran domestiknya. Lebih jauh, pemahaman beliau tentang perempuan dapat dilihat dari cara beliau memaknai al-Quran surah an-Nisa:34. Nyai Munjidah memandang surah an-Nisa:34 sebagai ayat yang berbicara peran gender dalam konteks keluarga. Nyai Munjidah mengatakan :

“surah an-Nisa ayat 34 adalah ayat gender. “ar-rijalu adalah sesuatu yang bersifat gender. an-nisa juga identitas gender. konteks muatannya adalah ayat tentang keluarga. Keluarga yang bagaimana, ya berbicara konteks keluarga pada masa lalu. Pada masa ayat itu diturunkan, karena faktor sosial ekonomi dan keamanan yang memungkinkan laki-laki yang bekerja di luar rumah, sementara perempuan yang menjaga harta benda di rumah. Maka ayat ini sebenarnya berbicara relasi saling mendukung.”

Realitas di atas ini banyak mengalami perubahan sehingga menurutnya memungkinkan peran gender bisa saling ditukarkan. Nyai Munjidah menambahkan :

“maka sifatnya saling support. Karena antara keluarga satu dengan yang lain bisa jadi berbeda realitasnya. Bisa jadi saat ini istri atau perempuan mempunyai penghasilan yang lebih banyak dari pada suaminya. Maka harus ada musyawarah antara keduanya. Maka ayat ini tidak bisa dipisahkan dengan an-nisa 35 yang meniscayakan suatu keluarga yang sedang mengalami persoalan untuk bermusyawarah dengan jalan mencari hakam atau juru damai antara keduanya. Jadi bukan bicara kepemimpinan di dunia luar, di dalam keluarga pun di tekankan justru pada saling mendukung dan bermusyawarah”

Ar-rijal maupun an-nisa di dalam al-Qur’an adalah kata ganti yang mewakili laki-laki maupun perempuan yang bersifat gender. Maka menurut Nyai Munjidah ayat itu jelas ayat yang bersifat gender, dengan konteks ayat tersebut bicara tentang keluarga. Pada Q.S.an-Nisa: 34, menyebutkan beberapa hal terkait relasi keluarga dari persoalan nafkah hingga nusyuz. Ayat tersebut juga mengatakan bahwa mengapa laki-laki menjadi pelindung atau “*qowwam*” bagi perempuan karena diantaranya memiliki kelebihan atas yang lainnya. Dilanjutkan pada Q.S.an-Nisa: 35 yang juga masih berbicara konteks keluarga. Menurut Nyai Munjidah :

“ayat selanjutnya dari Q.S.an-Nisa 34 juga berbicara tentang keluarga, ini menegaskan bahwa Q.S.an-Nisa: 34 dimana terdapat teks ar-rijalu qowwamuna ‘alan nisaa adalah berbicara gender. artinya ayat ini tidak bisa digeneralisasi semata-mata sebagai ayat kepemimpinan yang mengharuskan memilih pemimpin dalam semua hal, bukan saja dalam keluarga harus laki-laki. Di dalam Q.S.an-Nisa: 35 disebutkan pentingnya mencari kebaikan dari dua belah

pihak, dikatakan : wa in hiftum syiqoqo bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha..."

Di dalam Q.S an-Nisa 35 menyebutkan kemungkinan terjadi perselisihan dalam keluarga, sehingga jika ditakutkan hendak terjadi perceraian maka hendaklah meminta ahli baik dari pihak laki-laki maupun ahli dari pihak perempuan untuk menengahi konflik keduanya. Dari dua ayat tersebut Nyai Munjidah memberi pemahaman bahwa ayat tersebut justru ayat yang mendorong antara laki-laki dan perempuan saling mendukung, sehingga jika konteksnya pada masa awal kelahiran islam laki-laki yang bekerja karena faktor sosial ekonomi dan politik juga keamanan yang memungkinkan laki-laki yang bekerja, maka perempuan bertugas menjaga harta dan anak-anaknya. Nyai Munjidah menambahkan :

"Nah, kalau sekarang kondisinya berbeda, bisa jadi perempuan yang berada di garis depan. Lebih banyak gajinya dibanding laki-laki. Maka menurut ayat di atas sifatnya harus saling support. Satu keluarga bisa jadi berbeda dengan keluarga lainya tapi intinya, selain support, dan kedua adalah harus musyawarah antara dua belah pihak. Jadi Inti kepemimpinan baik di dalam keluarga maupun di wilayah public adalah memberi manfaat. Bisa jadi perempuan bisa memberi manfaat lebih banyak pada yang lainya ..."

Nyai Munjidah juga menambahkan bahwa pernikahan adalah mitsaqon gholidon atau ikatan yang kuat, sehingga walaupun tidak cocok harus ada upaya mencari titik tengah (*hakama min ahlihi wa hakama min ahliha*). Jadi jelas ayat ini ayat gender ayat keluarga yang isinya saling mendukung dalam ikatan yang kuat. Jadi bukan ayat kepemimpinan dalam rumah tangga apalagi kepemimpinan di ruang publik. Menurut Nyai Munjidah Ayat ini tidak bisa dijadikan justifikasi kepemimpinan laki-laki secara mutlak. Dimana sering dikatakan pemimpin harus laki-laki.

QS.an-Nisa: 34 juga seringkali menjadi argument bahwa kepemimpinan laki-laki di dalam rumah tangga mengharuskan perempuan menuruti semua kemauan laki-laki, termasuk poligami. Menurut pemikiran Nyai Munjidah keluarga yang Sakinah akan terbentuk jika didalamnya saling mendukung, sebaliknya poligami seringkali justru menjadi permasalahan yang menimbulkan keluarga menjadi tidak mengalami kedamaian dan kebahagiaan karena adanya rasa tersakiti, terancam dan cemburu. Mereka yang mendukung pemahaman kepemimpinan mutlak laki-laki seringkali menggunakan ayat al-Qur'an surah an-Nisa ayat 3 sebagai alasan untuk semakin menekan perempuan. Dalam hal ini Nyai Munjidah menyampaikan bahwa melihat ayat tidak bisa semata teks nya saja, harus melihat bagaimana latar belakang ayat itu diturunkan, situasi sosial politiknya seperti apa, struktur sosial masyarakatnya hingga kebiasaan-kebiasaan yang ada pada masyarakatnya. Nyai Munjidah Wahab mengatakan bahwa sebagaimana QS.an-Nisa: 34 yang memiliki pemahaman yang tidak literalis, dalam menempatkan Q.S.an-Nisa ayat 3 juga tidak melihatnya sebagai ayat legalitas poligami, sebaliknya ayat tentang bagaimana memperlakukan anak yatim. Konteks ayat itu menurutnya terkait pasca Perang Uhud dimana banyak syuhada yang gugur di medan perang. Nyai Munjidah mengatakan :

"ayat ini diturunkan setelah perang uhud, jadi bukan semata-mata bicara poligami. Dan membaca ayat ini tidak bisa sepotong-potong saja pada fankihuu, karena di depan sudah didahului pula dengan peringatan berbuat adil atau berbuat baik pada anak yatim. Bahkan diakhir ayat juga masih diperingatkan tentang bersikap adil."

Lebih jauh, Nyai Munjidah menilai bahwa seringkali pernikahan nabi hanya dilihat poligaminya, dan didakwahkan sebagai sunnah. Padahal nabi memberikan sunnah (contoh) yang lain dalam pernikahannya, yaitu pernikahan yang monogami yang justru menunjukkan dalam masa itu pernikahan nabi berada pada posisi yang ideal, sakinah, mawaddah wa rahmah. Nyai Munjidah menceritakan bahwa jika ditilik apa yang dilakukan nabi sebenarnya sangat revolusioner dalam memperbaiki struktur sosial yang menempatkan perempuan semata sebagai objek seksual. Pernikahan pertama nabi dilakukan di usia kedupuluhlima nabi, sementara istrinya yaitu Khadijah justru berusia 40 tahun. Disitu Nyai Munjidah melihat bagaimana nabi melakukan lompatan moral bahwa pernikahan bukan semata persoalan seksual. Apa yang dilakukan nabi dengan menikahi perempuan janda berusia 40 tahun di saat perempuan masih

menjadi komoditi mengandung pesan besar bagaimana menempatkan perempuan dalam pernikahan. Nyai Munjidah Mengatakan:

“ada karakter yang ingin di bangun nabi dalam pernikahannya dengan Sayyidah Khadijah. Di saat perempuan dimasa itu tidak dihargai, dijadikan objek seksual, diwariskan, nabi justru menikah dengan janda usia 40 tahun sementara nabi masih perjaka dan berusia 25 tahun...”

Nyai Munjidah kemudian menyampaikan konsep sunnah nabi, menurutnya, sunnah nabi ada yang berbentuk ucapan akan tetapi ada pula yang berbentuk perilaku atau perbuatan nabi. Perilaku nabi membantu umatnya untuk memahami karakter-karakter apa yang ingin dibawakan dan pesan apa dibalikinya. Sebagaimana pernikahan nabi yang pernah menjalani pernikahan monogami dan poligami. Pada pernikahan monogami nabi memperlihatkan kualitas pernikahan yang baik, bebas dari perselisihan, kecemburuan hingga percekocokan. Pernikahan monogami nabi dengan Khadijah memiliki durasi waktu yang lama yaitu dari nabi usia 25 tahun hingga nabi usia 52 tahun. Begitu nabi kehilangan sosok istrinya, Khadijah sehingga nabi sampai menjalani ‘ammul huzni atau tahun kesedihan hingga mencapai dua tahun. Setelah amul huzni dua tahun barulah kemudian nabi menikah kembali dan menjalani pernikahan poligami yang sejatinya tidak lebih lama waktunya dari pernikahan monogaminya, dimana pernikahan poligami terjadi antara nabi berusia 54 tahun hingga tutup usia atau usia 63 tahun. Nyai Munjidah mengatakan :

“...jadi manusia dihadapan tuhannya sama kedudukannya, begitupun penciptaannya. Tinggi rendahnya manusia di hadapan tuhan adalah dinilai dari ketakwaanya. Penciptaan zawj, pasangan tidak dipahami perempuan diciptakan dari laki-laki, tetapi Allah menciptakan manusia dari jenis yang satu tersebut pasangannya. Berarti kedudukannya sama...”

Menurut Nyai Munjidah tuhan tidak membedakan penciptakan manusia baik laki-laki maupun perempuan harus dimanifestasikan dalam menghormati dan menghargai manusia baik laki-laki maupun perempuan. Menurutnya, keduanya diciptakan untuk bekerja sama saling mengisi dalam memakmurkan dunia. Atas dasar itu menurutnya, meskipun Nyai Munjidah adalah seorang politisi, saat masih menjabat sebagai anggota dewan, saat suaminya masih ada, Nyai Munjidah tetap menempatkan suaminya sebagai pasangan hidup yang harus dihormati, sebagaimana suaminya, KH.Asy'ary menghormati pilihan-pilihan hidup Nyai Munjidah. Dalam keseharian, diantara tugas-tugasnya sebagai tokoh public dengan sejumlah agenda di luar rumah, Nyai Munjidah selalu menyiapkan dan memastikan hidangan makanan untuk suaminya. Hal kecil ini dilakukan dengan kesadaran bahwa sebagai suami istri, sebagai pasangan harus saling menghormati, menghargai, melayani dan mendukung.

4. Implementasi Pemikiran Nyai Munjidah Wahab

Nyai Masriyah memperlihatkan pribadi yang sadar gender dan keberadaannya sebagai perempuan pesantren tidak menghalanginya untuk berkiper di ruang publik. Implementasi pemikiran kesetaraan gender Nyai masriyah dapat dilihat :

- a. Sebagai kepala daerah Nyai Munjidah membuat kebijakan-kebijakan yang ramah perempuan seperti pelatihan ketrampilan bagi perempuan, membuat program untuk mendukung kesehatan reproduksi, menyelenggarakan sekolah keluarga, membuat usaha bersama (UB) dari perempuan-perempuan, memberi bantuan permodalan kepada entrepreneur perempuan, memberi dana afirmasi bagi perempuan yang menjadi kepala keluarga (single parent), hingga mendorong musrenbang desa melibatkan organisasi kemasyarakatan perempuan seperti Muslimat, Aisyah, Fatayat hingga Nasyyatul Aisyiah.
- b. Sebagai pengasuh pesantren, Nyai Munjidah mendidik para santrinya bukan hanya agar mahir membaca kitab kuning tetapi dibekali ilmu berorganisasi. Sistem pesantren pun di kembangkan dengan pola kepengurusan yang mengadopsi sistem parlementer, dimana kepengurusan pondok memiliki forum konferensi periodik yang menjadi ajang pertanggung jawaban kepemimpinan lama, rapat-rapat komisi untuk menentukan program tahun kepemimpinan berikutnya hingga menjadi wadah pemilihan ketua pengurus pondok yang baru dengan sistem legislasi. Santri-santri al-Latifiyah II sejauh ini memimpin diantara ribath pesantren di bawah yayasan Bahrul Ulum. Alfi, ketua pengurus ponpes putri al-Latifiyah II

mengatakan bahwa ibu Munjidah sangat mendorong santri-santrinya berkiprah di masyarakat dengan berlatih berorganisasi. Jika ada HIMAPON, ajang perlombaan antara ribath pesantren di bawah Bahrul Ulum yang berjumlah 46 ribath, kepemimpinannya selalu di pegang oleh santri al-Latifiyah II. Kurikulum pesantren al-Latifiyah pun memasukan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan kecakapan, seperti pelatihan public speaking, pelatihan menjadi tutor, pelatihan gender, dan berbagai seminar. Intan Budiana, senior di pesantren al-Latifiyah II mengatakan bahwa nyai Munjidah selalu menekankan santrinya menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lain, tidak berhenti hanya sebagai ibu rumah tangga dan mendidik santri-santrinya agar mandiri dan tidak tergantung dengan orang lain.

- c. Sebagai ibu : Nyai Munjidah mendidik putra-putrinya dengan kemandirian, berlatih berorganisasi dan menuntut putra-putrinya menjadi manusia yang siap berhidmah di masyarakat. Keluarganya dididik dalam kultur yang egaliter, dengan tidak membedakan jenis kelamin. Anak-anak beliau diberi kebebasan menempuh pendidikan sesuai pilihannya, tidak sebagaimana umumnya keluarga pesantren, anak-anak nyai Munjidah menempuh pendidikan dalam berbagai bidang di luar bidang agama. Putra pertama, H.Ahmad Sillahuddin Asy'ari kini menjabat sebagai DPR Propinsi. Putri ketiga, Hj. Ema Ummiyatul Chasanah adalah lulusan teknik sipil dan kini menjadi anggota legislative di DPR RI, putri keempat, Awin Tammah adalah sarjana pendidikan dan kini menjadi bendahara di kepengurusan Fatayat NU Wilayah Jawa Timur. Putri ke-tiga, Lailatun Ni'mah adalah sarjana hukum yang berkiprah di masyarakat dalam organisasi fatayat sebagai ketua di kepengurusan Cabang Kabupaten Jombang.
- d. Sebagai pribadi : nyai Munjidah menunjukkan pribadi yang berfikiran terbuka, egaliter dan tidak diskriminasi gender. beliau telah ditempa dalam dunia politik dari usia 21 tahun sehingga membentuknya menjadi politisi yang dewasa, santun dan konsisten. Dalam memimpin organisasi masyarakat berbasis massa terbesar di Jawa Timur yaitu Muslima NU, beliau mampu mengayomi berbagai pihak yang berbeda secara politik.

5. Nyai Munjidah Wahab dan Gerakan Ksetaraan Gender di Pesantren

Dalam khazanah pesantren, perempuan memiliki kedudukan yang sangat penting. Perempuan adalah madrasah (lembaga pendidikan) utama bagi perkembangan anak dalam keluarga, perempuan juga dikatakan sebagai pondasi negara (*imadul bilad*), dan perempuan yang baik dinilai sebagai sebaik-baik perhiasan dunia. Nilai-nilai tentang perempuan yang diendapkan dari al-Qur'an dan hadist membentuk nalar keagamaan tersendiri bagi perempuan pesantren yang sedari kecil ditempa oleh teks-teks agama.

Pada pribadi Nyai Munjidah, internalisasi nilai-nilai perempuan pesantren melekat kuat dalam dirinya. Sedari kecil, disaat anak-anak yang lain belajar agama mencukupkan dengan belajar membaca al-Qur'an, maka Nyai Munjidah kecil sudah dikenalkan belajar huruf pegon, membaca karya-karya para ulama yang berbahasa arab dengan makna model pesantren, merapal kitab jurumiyah, shorof, nadhoman tauhid hingga sampai pada pendidikan tingkat atas di muallimat. Menjadi perempuan pesantren, Nyai Munjidah dididik lebih dalam mengenai ilmu-ilmu agama, bertata krama ala pesantren hingga cara berpakaian sehari-hari.

Persentuhan Nyai munjidah dengan beragam kitab-kitab kuning memberikan pengaruh pula pada keluasan berfikir terutama dalam berhadapan dengan teks. Teks al-Qur'an dipelajari tidak semata secara tekstual, keragaman tradisi kitab kuning pesantren memberi pengaruh pada penerimaan nalar islam yang moderat. Ayahnya, KH Wahab Chasbullah dikenal sebagai ulama sekaligus nasionalis sejati, memberikan bekas yang lekat pada pemikiran Nyai Munjidah untuk menempuh jalur politik sebagai bagian manifestasi nalar keberagamaannya. Jejak kiprah KH wahab Chasbulloh, ayah Nyai Munjidah dalam menegakkan NKRI antara lain terprasasti dalam lagu syabanul wathon yang saat ini populer sebagai lagu yang menyerukan cinta tanah air.

Nyai Munjidah Wahab memberikan warna perempuan pesantren yang seringkali distigmakan sebagai kelompok yang ter subordinasi dan termarginalkan dalam kultur feodalistik. Nyai Munjidah bersama suaminya, KH Asy'ari mampu mengembangkan pesantren yang telah dirintis ayahnya, mendirikan lembaga pendidikan unggulan sebagai penerus pemikiran ayahnya, mengantarkan putra-putrinya menjadi orang-orang yang sukses dalam pendidikan dan karir,

berhidmah di organisasi masyarakat dari fatayat hingga muslimat, berkarir di dunia politik yang mengantarkannya berkali-kali duduk di kursi anggota dewan hingga menduduki jabatan nomor satu di kabupaten Jombang sebagai Bupati. James P. Spradley mengutip definisi kebudayaan menurut Marvin Harriss dapat berupa penampakan dalam berbagai pola tingkah laku yang dikaitkan dengan kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Maka dapat dipahami pola tingkah laku Nyai Munjidah Wahab adalah citra diri dimana dirinya dan pola tingkah lakunya tidak bisa dilepaskan dari kelompok perempuan pesantren.

Guna memahami lebih dalam Gerakan kesetaraan gender Nyai Munjidah Wahab dalam komunitas sosialnya yaitu perempuan pesantren, melalui prespektif budaya dapat dianalisis dari sisi budaya adaptif. Manifestasi Nyai Munjidah sebagai perempuan pesantren dari sisi budaya adaptif merupakan sintesa dari situasi internal dan eksternal yang dihadapinya. Tidak bisa dihindarkan, sebagai perempuan pesantren dengan norma-norma yang telah baku, dibutuhkan resiliensi atau daya lenting dengan melakukan penyesuaian terhadap berbagai perubahan yang melingkupinya agar tetap bertahan hidup (*survive*) dengan pilihan *real life* nya bukan saja di pesantren tetapi juga di dalam masyarakat dan di jalur politik. Bentuk adaptasi yang dilakukan Nyai Munjidah antara lain pada upayanya dalam mempengaruhi atau merubah lingkungan, baik berupa adaptasi aktif maupun pasif. Adaptasi aktif (*alloplastis*) adalah aktivitas dirinya untuk mengubah lingkungan agar sesuai dengan keinginan diri. Adaptasi pasif (*autoplastis*) adalah upaya mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan.

Bentuk adaptasi budaya aktif yang dilakukan Nyai Munjidah antara lain termanifestasi dalam beberapa hal seperti upayanya membawa arah pesantren yang di bawah asuhanya menjadi pesantren yang terbuka terhadap perubahan, mengadaptasi pesantren dengan sistem parlementer, memasukan ide-ide pergerakan pada santri-santrinya sehingga santri-santri al-Latifiyah memiliki citra yang berbeda dan dominan mewarnai dalam organisasi ribath pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Ribath Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras yang membawahi 46 Pesantren memiliki banyak warna, beberapa diantaranya masih salaf murni, menolak santrinya membawa HP serta melarang santrinya mengikuti kegiatan di luar kompleknya.

Bentuk adaptasi budaya pasif yang dilakukan Nyai Munjidah antara lain termanifestasi dalam upaya Nyai Munjidah menyerap nilai-nilai organisasi yang egaliter yang berbeda dengan kultur pesantren yang setidaknya memuat unsur-unsur feodalistik. Kultur pesantren yang umumnya menempatkan keluarga kyai sebagai ning atau nyai yang banyak mendapatkan privilege atau kekhususan-kekhususan dalam banyak hal, memungkinkan Nyai Munjidah mendapatkan banyak kemudahan dalam kehidupannya. Pergumulan Nyai Munjidah dalam dunia organisasi dan politik memberikan banyak pelajaran bagi Nyai Munjidah diantaranya prestasi adalah capaian yang harus diupayakan (*achived*) bukan hasil pemberian (*ascribed*).

Dalam prespektif gender, Nyai Munjidah sebagai perempuan pesantren menunjukkan personality Nyai Munjidah yang sadar gender dan bersikap mewujudkan perilaku kesetaraan gender di lingkungannya. Kesetaraan gender dapat dilihat dari adanya 4 (empat) parameter, yaitu : akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Nyai munjidah sebagai perempuan pesantren menunjukkan keempat pamater tersebut berjalan saling mendukung dalam perilaku kesehariannya. Nyai Munjidah adalah sedikit dari perempuan pesantren yang memiliki kesempatan dan akses yang sama dengan laki-laki baik dalam kewenangan di pesantren maupun dalam politik. Nyai Munjidah pun memiliki ruang partisipasi yang luas dan maksimal, baik melalui lembaga pesantrennya, lembaga formal yang didirikannya, organisasi kemasyarakatan, hingga melalui jalur politik yang ditempuhnya. Dengan keberadaanya, Nyai Munjidah memiliki kapasitas terhadap kontrol kebijakan baik di masyarakat maupun dalam porsinya sebagai eksekutif.

Nyai Munjidah menginternalisasikan nilai-nilai al-Qur'an yang membawa pesan keadilan gender dan memanifestasikannya dalam kehidupan sehari-hari mewujudkan dalam upaya-upayanya mewujudkan kesetaraan gender dalam diri dan lingkungannya. Hal ini sejalan dengan cita tinggi islam, sebagai agama rahmatan lil 'alamaiin. Islam adalah agama yang mengedepankan nilai keadilan dan keseimbangan, termasuk di dalamnya keadilan dalam relasi laki-laki dan perempuan.

Jika menilik kepada sejarah islam di masa nabi, kondisi perempuan di masa nabi aktif terlibat dalam berbagai bidang kehidupan dan menggeluti berbagai profesi. Istri-istri nabi menunjukkan mereka memiliki tempat di ruang publik dengan profesinya masing-masing. Sayyida Khadijah sendiri adalah seorang konglomerat yang berhasil dalam usaha di bidang ekspor impor, Shafiyah binti Huyay adalah seorang perias pengantin, Zainab binti Jahsy bekerja di home industry pada penyamakan kulit hewan. Selain istri-istri nabi, sejarah juga merekam keberadaan Qilat Ummi Bani Ammar yang pernah dating kepada nabi meminta petunjuk mengenai jual beli, Raithah, istri sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud juga aktif berbisnis dan ada pula Asyifa, seorang perempuan yang ditugasi mengurus pasar di kota Madinah.¹⁷

Kesetaraan gender yang dicitrakan dan diperjuangkan Nyai Munjidah sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam islam, diantaranya, al-Qur'an menyebutkan laki-laki dan perempuan keduanya berkedudukan sebagai hamba Allah (Q.S.al-Zariyat/51:56), Baik laki-laki maupun perempuan mempunyai tugas yang sama menjadi khalifah di bumi (Q.S.al-An'am/6:165), perjanjian primordial dari tuhan yang terekam dalam al-Qur'an melibatkan laki-laki dan perempuan (Q.S.al-A'raf/7:172), Drama kosmis dalam al-Qur'an melibatkan Adam dan Hawa sebagai simbol laki-laki dan perempuan (Q.S.al-Baqarah/2:35), Q.S.al-A'raf/7:20), Q.S.al-A'raf/7:22-23), (Q.S.al-Baqarah/2:187) dan al-Qur'an menyebutkan bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai potensi yang sama meraih prestasi (Q.S.'Ali Imran/3:195).

Al-Qur'an mengenal konsep gender dan menggunakannya dalam ayat-ayatnya yang justru ketika ditilik, ayat-ayat gender tersebut menunjukkan realitas sosial yang tidak baku dan bersifat temporal. Al-Qur'an menggunakan distingsi gender bukan untuk mendiskriminasi salah satu gender. Al-Qur'an menyatakan kedua jenis tersebut sama-sama memiliki kelebihan dan keutamaan. Meskipun ditemukan ayat bahwa laki-laki memiliki setingkat lebih tinggi di atas perempuan, tetapi dalil lain juga menyatakan perempuan lebih utama dari pada laki-laki.

D. Kesimpulan

Dari penelitian di atas dapat disimpulkan beberapa hal diantaranya yaitu :

- a. Pemikiran Nyai Munjidah Wahab sebagai perempuan pesantren ditinjau dari prespektif gender menunjukkan bahwa Nyai Munjidah adalah perempuan pesantren yang memiliki nalar keagamaan yang kuat atas kesetaraan gender (*gender equality*) berbasis al-Qur'an dan hadist.
- b. Implementasi Pemikiran Nyai Munjidah Wahab dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, sosial, pesantren hingga politik diwarnai dengan nilai kesetaraan gender
- c. Dalam prespektif kesetaraan gender, figur Nyai Munjidah menjadi manifestasi kesetaraan gender di pesantren.
- d. Nyai Munjidah Wahab memberi warna lain Gerakan kesetaraan gender melalui organisasi dan politik dengan nilai kemanfaatan yang menjadi dasarnya.

¹⁷ Nasaruddin Umar, Ketika Fikih *Membela* Perempuan, (Jakarta : Media Komputindo, 2014), 177

Daftar Pustaka

- Achmad Satori Ismail, "Fiqih Perempuan dan Feminisme" dalam *"Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam"* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000)
- Burhanuddin, Hamam, Stit Islamiyah, Karya Pembangunan, and Paron Ngawi. "Pendidikan Berperspektif Gender Di Pesantren." *Al-Murabbi* 2, no. 1 (2015)
- Dhofier, Zamakhsyari *Tradisi Pesantren; Studi Pandangan Hidup Kiai dan visinya mengenai masa depan Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2011)
- Fakih, Mansor, *Analisa Gender dan transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.ke.15, 2013)
- Muhammad, Hussein, *Perempuan, Islam dan Negara: Pergulatan Identitas dan Entitas*, (Yogyakarta: Qolam, 2016)
- Humm, Maggi, *Ensiklopedi Feminisme*, (Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru, 2002)
- Latifah, Nur, and Asep Supena. "Analisis Attention Siswa Sekolah Dasar Dalam Pembelajaran Jarak Jauh Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Basicedu* 5, no. 3 (2021): 1175-82. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i3.887>.
- Prasetyawan, Ahmad Yusuf, and Lis Safitri. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Pesantren." *YINYANG: Jurnal Studi Islam, Gender Dan Anak* 14, no. 1 (2019): 39-69. <https://doi.org/10.24090/yinyang.V14>.
- Qibtiyah, Alimatul, *Feminisme Muslim di Indonesia*, (Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, 2017)
- Rawat, Preeti S. "Patriarchal Beliefs, Women's Empowerment, and General Well-Being" 39, no. 2 (2014): 43-55. <https://doi.org/10.1177/0256090920140206>.
- Rofiah,, Nur Bil.Uzm., *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas keperempuanan dan Keislaman*, (Bandung: Afkaruna, 2020)
- Suhendra, Ahmad. "Rekonstruksi Peran Dan Hak Perempuan Dalam Organisasi Masyarakat Islam." *Musāwa* Vol. 11, no. 1 (2012)
- Umar, Nasaruddin, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, (Jakarta : Media Komputindo, 2014)
- Umar, Nasarudin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta : Paramadina, 1999)
- Ulyani, Farida. "Politik Kepemimpinan Pesantren : Peran Publik Perempuan Di Pesantren Daarut Tauhid Bandung" 7, no. 2 (n.d.): 457-82.